



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021)3843348 Faksimile (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

Nomor : 4443/SEK/KU1.4/XII/2024 Jakarta, 9 Desember 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyusunan Rencana PNBP Tahun
2026 Pada Aplikasi TPNBP versi 7.0

- Yth.1. Panitera Mahkamah Agung;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN);
 5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Peradilan Umum, Agama dan TUN;
 6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Peradilan Umum, Agama dan TUN.

di –
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Bapak/Ibu diharapkan untuk dapat segera menyusun rencana PNBP Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengisian rencana PNBP Tahun Anggaran 2026 menggunakan aplikasi TPNBP versi 7.0;
2. Rencana PNBP disusun secara realistis, optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Data rencana PNBP Tahun Anggaran 2026 mengacu pada data realisasi PNBP tahun 2024 yang menjadi penerimaan rutin satuan kerja, dengan kategori dan akun sebagai berikut:
 - a. PNBP Umum
 - 425131: Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan;
 - b. PNBP Fungsional
 - 425231: Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan;
 - 425232: Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan;
 - 425233: Pendapatan Ongkos Perkara;
 - 425239: Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.

Adapun realisasi dari kelima akun tersebut diatas disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan serta potensi yang ada pada tiap satuan kerja pemungut/penghasil PNBPN;

4. Arsip Data Komputer (ADK) dari aplikasi TPNBP versi 7.0 disampaikan secara berjenjang oleh satuan kerja Tingkat Pertama kepada Tingkat Banding, dan Tingkat Banding menyampaikan kepada Eselon I;
5. Penyampaian ADK dari aplikasi TPNBP versi 7.0 oleh Tingkat Banding dilakukan melalui *link* berikut : linktr.ee/pnbp;
6. Unit Eselon I (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) berkewajiban untuk mengompilasi ADK TPNBP versi 7.0 fungsional Satuan Kerja di Bawahnya;
7. Unit Eselon I (Kepaniteraan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) mengirimkan file ADK aplikasi TPNBP versi 7.0 dengan ekstensi ".pdu" (per-department unit) ke Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi paling lambat hari Jumat, 13 Desember 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung;
3. Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
4. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi.